



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH**

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan ridho-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 dapat kami selesaikan.

Penyusunan LKjIP merupakan konsekuensi dari amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam regulasi tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

LKjIP ini pada dasarnya merupakan laporan penyelenggaraan program, kegiatan, dan sub kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selama tahun 2023 terutama dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam mencapai setiap Sasaran Strategis yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Perubahan (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2023-2026 yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kinerja 2023.

Berbagai keberhasilan yang dicapai merupakan hasil kerja keras semua pihak yang terlibat yang hendaknya menjadi motivasi agar lebih inovatif dan kreatif untuk perbaikan kinerja kedepan begitu juga dengan kekurangan yang dialami hendaknya menjadi intropeksi terhadap kebijakan yang akan timbul, sehingga dapat menjadi masukan yang berharga bagi penyelenggaraan pemerintahan khususnya di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat dimasa mendatang.

Dengan LKjIP ini, kami berharap dapat menjadi media untuk membangun kebersamaan dan sinergitas berdasarkan kesadaran dan komitmen bersama dilandasi sikap kekeluargaan, kejujuran dan ketulusan

untuk berbuat yang terbaik bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada khususnya dan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya.

Terima Kasih.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Mamuju, 1 Maret 2024

Kepala Badan,



H. Masriadi Nadi Atjo, S.E., M. Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP: 197708052002121009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, dijelaskan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan pendapatan, keuangan, dan barang milik daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BPKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476 ayat (1) Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten Kota, Penatausahaan Kas Daerah, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Barang Milik Daerah, Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Pendapatan Daerah Dan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

BPKPD dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan Anggaran dan Bina Kabupaten, Penatausahaan Kas Daerah, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi dan Pendapatan Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan Anggaran dan Bina Kabupaten, Penatausahaan Kas Daerah, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi dan Pendapatan Daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Anggaran dan Bina Kabupaten, Penatausahaan Kas Daerah, Akuntansi dan Pelaporan

- Keuangan Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi dan Pendapatan Daerah;
- d. pengoordinasian dan fasilitasi di bidang Anggaran dan Bina Kabupaten, Penatausahaan Kas Daerah, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi dan Pendapatan Daerah;
 - e. pengendalian di bidang Anggaran dan Bina Kabupaten, Penatausahaan Kas Daerah, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi dan Pendapatan Daerah;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya dan dengan sumber daya yang dimiliki, instansi pemerintah diwajibkan untuk menyiapkan, menyusun, dan menyampaikan informasi kinerja secara tertulis, periodik, dan melembaga sebagai perwujudan normatif pertanggungjawaban laporan kinerja dalam satu tahun anggaran yang telah ditetapkan untuk mengukur tingkat capaian kinerja instansi pemerintah yang tertuang dalam rumusan tujuan dan sasaran.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, susunan organisasi BPKPD terdiri atas:

- a. Sekretariat
- b. Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten
- c. Bidang Penatausahaan dan Kas Daerah
- d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- e. Bidang Barang Milik Daerah
- f. Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi
- g. Bidang Pendapatan Daerah
- h. UPTD P2RD Kab. Mamuju
- i. UPTD P2RD Kab. Polewali Mandar
- j. UPTD P2RD Kab. Majene

- k. UPTD P2RD Kab. Mamasa
- l. UPTD P2RD Kab. Pasangkayu
- m. UPTD P2RD Kab. Mamuju Tengah

Adapun Susunan Kepegawaian dan kelengkapan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Badan;
- 2) Sekretariat Badan;

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 478 huruf a, mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi dilingkungan BPKPD.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja;
- c. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan penatausahaan kas daerah dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- d. pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, perlengkapan dan pengelolaan aset, hubungan masyarakat serta urusan perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
- f. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- g. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan produk hukum di lingkungan BPKPD; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

3) Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten

Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 478 huruf b, mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan mengoordinasikan kegiatan Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten.

Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. mengkoordinir penyusunan APBD dan memfasilitasi TAPD;
- b. menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD;
- c. mengoordinasikan perencanaan anggaran pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan;
- d. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan kabupaten; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten, terdiri atas:

- a. Subbidang Penganggaran Pendapatan dan Belanja Operasi;
- b. Subbidang Bina Kabupaten; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

4) Bidang Penatausahaan dan Kas Daerah

Bidang Penatausahaan dan Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 478 huruf c, mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di Bidang Penatausahaan dan Kas Daerah.

Bidang Penatausahaan dan Kas Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkordinasian pengelolaan kas daerah;
- b. pengkordinasian pemindahbukuan uang kas daerah;
- c. pengkordinasian penatausahaan pembiayaan daerah;
- d. pengkordinasian pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;

- e. pengkordinasian penempatan uang daerah dengan membuka rekening Kas Umum Daerah;
- f. pengkordinasian pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar SP2D;
- g. pengkordinasian pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ Gaji dan Non Gajiserta Penerbitan SKPP;
- h. pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian dan penerbitan Anggaran Kas dan SPD;
- i. pengkordinasian penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
- j. pengkordinasian pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;
- k. pengkordinasian rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
- l. pengkordinasian penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban (SPJ);
- m. pengkordinasian pelaksanaan penerbitan SPD restitusi / pengembalian kelebihan penerimaan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

5) Bidang Penatausahaan dan Kas Daerah

Bidang Penatausahaan dan Kas Daerah, terdiri atas:

- a. Subbidang Penatausahaan Belanja Operasi;
- b. Subbidang Kas Daerah; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 478 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum serta koordinasi di bidang Akuntansi Keuangan dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Akuntansi BMD serta Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan umum di bidang Akuntansi Keuangan dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Akuntansi BMD serta pelaporan dan pertanggungjawaban;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan umum di bidang Akuntansi Keuangan dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Akuntansi BMD serta pelaporan dan pertanggungjawaban;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang Akuntansi Keuangan dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Akuntansi BMD serta pelaporan dan pertanggungjawaban;
- d. pemantauan dan Evaluasi pelaporan di bidang Akuntansi Keuangan dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Akuntansi BMD serta pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, terdiri atas:

- a. Subbidang Akuntansi Keuangan dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR);
- b. Subbidang Akuntansi BMD; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

6) Bidang Barang Milik Daerah

Bidang Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 478 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum serta koordinasi di bidang perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan,

penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta penatausahaan dan pengendalian.

Bidang Barang Milik Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi;

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta penatausahaan dan pengendalian;
- b. koordinasi di bidang perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta penatausahaan dan pengendalian;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaporan di bidang perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta penatausahaan dan pengendalian; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Bidang Barang Milik Daerah, terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- b. Subbidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

7) Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi

Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 478 huruf f, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum serta koordinasi di bidang Perencanaan dan Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pengamanan, Penatausahaan dan Pengendalian.

Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi;

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain;
- b. perumusan kebijakan tentang intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain;
- c. pelaksanaan kajian dan analisis regulasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain;
- d. perumusan standardisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain;
- e. pelaksanaan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain;
- f. perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain;
- g. perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain kepada masyarakat;
- h. perumusan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain;
- j. pelaksanaan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain;
- k. penyelenggaraan sistem teknologi informasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain baik internal maupun eksternal;
- l. pelaksanaan pemeliharaan berbasis data teknologi informasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain;
- m. pelaksanaan pengawasan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain;

- n. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain lain; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi, terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan Pendapatan;
- b. Subbidang Teknologi Informasi Pendapatan dan Keuangan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

8) Bidang Pendapatan Daerah

Bidang Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 478 huruf g, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum serta koordinasi di Bidang Pajak Daerah, Retribusi dan Pendapatan Lainnya.

Bidang Pendapatan Daerah, terdiri atas:

- a. Subbidang Pajak Daerah;
- b. Subbidang Pendapatan dan Retribusi Daerah; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

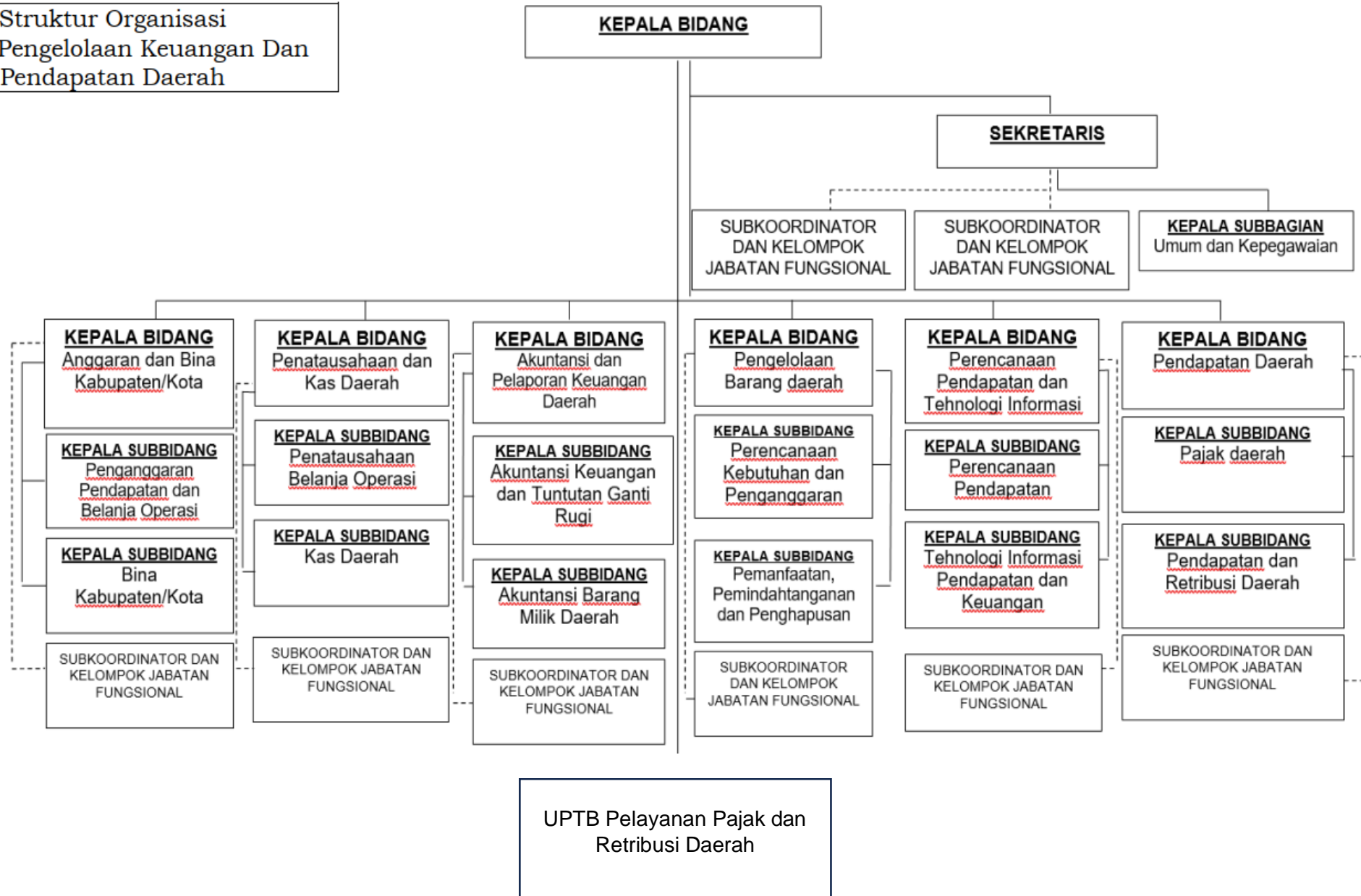
9) UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 41 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

UPTD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat terdiri atas:

- a. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mamuju;
- b. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
- c. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Pasangkayu;

- d.UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Polewali
Mandar;
- e.UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mamasa;
- f. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Majene

Struktur Organisasi
Badan Pengelolaan Keuangan Dan
Pendapatan Daerah



Adapun kondisi kepegawaian pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan Golongan/Ruang

Tabel 1.1 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan		
No.	Golongan/Ruang	Jumlah
1	Ia	0
2	Ib	0
3	Ic	0
4	Id	0
5	Ila	0
6	Ilb	3 Orang
7	Ilc	2 Orang
8	Ild	6 Orang
9	Illa	11 Orang
10	IIlb	37 Orang
11	IIlc	32 Orang
12	IIld	52 Orang
13	IVa	12 Orang
14	IVb	6 Orang
15	IVc	1 Orang
16	IVd	0
17	IVe	0
Jumlah		162 orang

b. Berdasarkan Sub Unit Kerja

Tabel 1.2 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Sub Unit Kerja		
No	Sub Unit Kerja	Jumlah ASN
1	Sekretariat	17 Orang
2	Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten Kota	10 Orang
3	Bidang Penatausahaan dan Kas Daerah	15 Orang
4	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	13 Orang
5	Bidang Barang Milik Daerah	14 Orang
6	Bidang Perencanaan, Pendapatan, dan Teknologi Informasi	12 Orang
7	Bidang Pendapatan Daerah	13 Orang
8	UPTD P2RD Kab. Mamuju	13 Orang
9	UPTD P2RD Kab. Polewali mandar	15 Orang
10	UPTD P2RD Kab. Majene	18 Orang

11	UPTD P2RD Kab. Mamasa	6 Orang
12	UPTD P2RD Kab. Pasangkayu	7 Orang
13	UPTD P2RD Kab. Mamuju Tengah	9 Orang
	Total	162 Orang

c. Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tabel 1.3

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	SD	0 Orang
2	SMP	0 Orang
3	SMA	13 Orang
4	D2	1 Orang
5	D3	13 Orang
6	D4	5 Orang
7	S1	86 Orang
8	S2	44 Orang
	Jumlah	162 Orang

B. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN LKjIP

Dengan diterbitkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tetang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai unsur penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk bertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP tersebut disusun berdasarkan dokumen perencanaan dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan rencana kinerja tahun

2023. LKjIP juga dimaksudkan sebagai umpan balik untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja khususnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan pada umumnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat serta mendorong penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*).

Esensi dari sistem LKjIP bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik, dibidang pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan barang milik daerah, dan pengelolaan pendapatan daerah. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintahan untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategi kepala daerah yang diampu oleh perangkat daerah dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaian (program, kegiatan, dan sub kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus sistem LKjIP diawali dengan penyusunan rencana strategis yang mendefinisikan visi dan misi kepala daerah yang menjadi tanggung jawab BPKPD, tujuan/sasaran strategis BPKPD secara selaras tiap tahun yang ditetapkan melalui program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan/sasaran strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang diperoleh pada setiap akhir periode pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada stakeholder dalam wujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP memiliki dua fungsi utama yang mencakup dua aspek sekaligus yaitu aspek akuntabilitas kinerja dan aspek manajemen kinerja. Dilihat dari aspek akuntabilitas kinerja, LKjIP berfungsi bagi keperluan eksternal organisasi, LKjIP 2023 menjadi sasaran pertanggungjawaban Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah atas capaian kinerja yang diperoleh pada tahun 2023. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sejauh mana tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai. Dilihat dari aspek manajemen

kinerja, LKjIP berfungsi bagi keperluan internal organisasi, dalam hal ini LKjIP 2023 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat bagi upaya-upaya perbaikan kinerja dimasa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga pencapaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

C. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UMUM YANG DIHADAPI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

Berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi serta uraian kondisi SDM pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, dapat digambarkan bahwa dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan Barang Milik Daerah, dan pengelolaan pendapatan daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat mendapatkan tantangan untuk dapat mewujudkannya. Dalam kaitan tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Dearah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang keuangan, pendapatan, barang milik daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tidak hanya harus patuh terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, namun juga melakukan pembinaan pengelolaan keuangan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Disamping itu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dituntut untuk mampu berperan seabagai Institusi yang mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan, pendapatan dan Barang Milik Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

maupun pemerintahan yang bersih (Clean Governance) untuk mewujudkan Sulawesi Barat yang Maju dan Malaqbiq.

Selain itu BPKPD Provinsi Sulawesi Barat memiliki peran yang sangat esensial dalam pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan pendapatan daerah dan mengelola Barang Milik Daerah secara optimal dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi dengan mengedepankan akuntabilitas, disamping melakukan evaluasi dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah pada kabupaten.

Isu strategis dan permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak daerah;
- b. Belum optimalnya pengelolaan aset daerah;
- c. Belum optimalnya manajemen pengelolaan keuangan daerah;

Adapun identifikasi permasalahan dan isu strategis seusai dengan tugas dan fungsi yang melekat pada BPKPD sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra BPKPD 2023-2026) adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3
Permasalahan yang dihadapi BPKPD

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Pengelolaan keuangan belum optimal	Penetapan APBD tidak tepat waktu	Keterlambatan penyusunan RKA dari OPD
		Laporan keuangan berbasis akrual belum optimal	Pemahaman pengelola keuangan di masing-masing perangkat daerah mengenai akuntansi pemerintahan berbasis akrual belum memadai

2.	Pengelolaan Barang Milik Daerah belum memadai	Belum dapat mewujudkan good governance dalam tata kelola Barang Milik Daerah	Tata kelola BMD yang belum tertib
			Penggunaan sistem informasi belum optimal
			Belum meratanya pemahaman pengelolaan BMD
3.	Pengelolaan pendapatan belum optimal	Kemampuan keuangan masing tergantung dari dana transfer pemerintah pusat	Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah belum tergali secara optimal
		Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah belum optimal	Kesadaran wajib pungut pajak dan retribusi daerah masih rendah
			Kesadaran wajib pajak dalam melaporkan obyek pajak masih rendah
			Penggunaan sistem informasi PAD belum optimal
		Pelayanan pajak daerah tidak optimal	Kantor UPTD P2RD belum representative
			Sistem pelayanan pajak pada UPTD P2RD belum optimal

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Sebagaimana disebutkan pada BAB I bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, dijelaskan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan pendapatan, keuangan, dan barang milik daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat berpedoman pada dokumen perencanaan dan penganggaran yang terdapat pada:

- a. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
- b. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026;
- c. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023;
- d. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BPKPD T.A. 2023;
- e. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Pembangunan Sulawesi Barat periode Tahun 2023-2026 dijabarkan ke dalam 4 Tujuan dan 11 Sasaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran RPD Prov. Sulbar Tahun 2023-2026

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET			
				2023	2024	2025	2026
T.1. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah		Pendapatan Per Kapita	Juta Rupiah/Kapita /Tahun	42,65	46,31	50,29	54,61
	SS.1. Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Mendukung Perekonomian Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,5	5,1	5,8	6,7
	SS.2. Membaiknya Standar Hidup dan Daya Beli Masyarakat Miskin	Tingkat Kemiskinan	Persen	10,72	10,25	9,73	9,06
	SS.3. Menurunnya Kesenjangan antar Lapisan Masyarakat	Indeks Gini Rasio	Poin	0,350	0,346	0,338	0,325
	SS.4. Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,98	2,76	2,45	1,95
T.2. Meningkatkan Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berbudaya		Indeks Pembangunan Manusia	Poin	68,16	69,36	70,36	71,56
	SS.5. Meningkatnya Partisipasi Pendidikan yang Merata	Indeks Pendidikan	Poin	0,6495	0,6671	0,6815	0,6986

	SS.6. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	0,7231	0,7407	0,7551	0,7722
T.3. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	77,45	78,50	79,75	80,50
	SS.7. Meningkatnya Penanggulangan dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	34,3	34,6	34,9	35,2
	SS.8. Meningkatnya Sistem Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Risiko Bencana	Poin/Kategori	161/ Tinggi	158/ Tinggi	153/ Tinggi	144/ Sedang
T.4. Mewujudkan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa		Indeks Reformasi Birokrasi	Poin/Kategori	66,86/ B	70,16/ BB	74,66/ BB	80,16/ A
	SS.9. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai AKIP	Poin/Kategori	70,29/ BB	73,56/ BB	77,54/ BB	80,54/ BB

		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Poin	74,776	75,524	76,279	77,042
	SS.10. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks SPBE	Poin	2,35	2,55	2,80	3,00
	SS.11. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Poin	100	100	100	100

Berdasarkan rincian Tujuan dan Sasaran Strategis pada RPD telah ditetapkan rumusan strategi dan arah kebijakan serta program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. BPKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya memiliki peranan dalam mendukung **Tujuan 4: “Mewujudkan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa”** khususnya pada **Sasaran Strategis 9: Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel** dan **Sasaran Strategis 11: Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing**. Dukungan terhadap tujuan dan sasaran strategis tersebut diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2

Dukungan Program Pada BPKPD terhadap Tujuan dan Sasaran Strategis RPD Prov. Sulbar Tahun 2023-2026

Tujuan 4: Mewujudkan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa				
Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas
SS.9.	Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Meningkatkan Pengelolaan Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja, serta Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah • Ketaatan dan transparansi pengelolaan keuangan daerah 	Program Pengelolaan Keuangan Daerah (Indikator: Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Daerah)
SS.11.	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	Mempercepat Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan Sistem Pelayanan dan Pengaduan Publik yang Terpadu dan Terintegrasi • Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik • Peningkatan Profesionalitas ASN di Bidang Pelayanan Publik 	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan)

Sesuai dengan rumusan pada tabel di atas, BPKPD mendukung dua Sasaran Strategis melalui dua (2) Program yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah. Dalam hal pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan, BPKPD sesuai dengan tugas fungsinya sebagai perangkat daerah penunjang urusan pemerintahan membidangi urusan keuangan, barang milik daerah, dan pendapatan daerah. Dengan demikian BPKPD selain mendukung tujuan dan sasaran RPD melalui Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, juga menjalankan tugas dan fungsinya melalui Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan sasaran dan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (Empat) tahun sesuai dengan masa dokumen perencanaan jangka menengah (Renstra). Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan sasaran sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik dan terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tabel 2.3
Tujuan dan Sasaran Berdasarkan Renstra BPKPD
2023-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- (%)			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	6	7	8	9
1	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan, Manajemen Aset Daerah, dan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang optimal		Hasil Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP
		1. Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Tingkat Kepatuhan Terhadap SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan)	100	100	100	100
		2. Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	22	24	26	28

Bertitik tolak pada kondisi di atas, BPKPD menyusun strategi yang merupakan suatu respon terhadap tujuan dan sasaran yang merupakan manifestasi dari tujuan dan sasaran RPD Prov. Sulbar Tahun 2023-2026 yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dituangkan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKPD.

Rumusan strategi dan kebijakan BPKPD sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Renstra BPKPD Tahun 2023-2026 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tujuan 4 RPD : Mewujudkan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa				
Sasaran Strategis RPD SS9 : Menguatnya Manajemen Kinerja Dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel SS11 : Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing				
NO	TUJUAN BPKPD	SASARAN BPKPD	STRATEGI BPKPD	ARAH KEBIJAKAN BPKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan, Manajemen Aset Daerah, dan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang optimal	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	1. Meningkatkan pengelolaan penganggaran APBD yang transparan dan akuntabel serta berorientasi kinerja; 2. Meningkatkan pembinaan dan koordinasi terhadap OPD terkait penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan keuangan; 1. Meningkatkan pembinaan pengelolaan keuangan daerah kabupaten. Mengoptimalkan penyusunan perencanaan pengadaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah; 3. Mengoptimalkan penertiban dan tata kelola BMD.	1. Memperkuat tata kelola keuangan yang baik meliputi proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan; 2. Penetapan standar penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan keuangan; 3. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem dan teknologi informasi yang terintegrasi. 4. Meningkatkan koordinasi dalam hal percepatan persetujuan penetapan tahapan penyusunan APBD; 5. Meningkatkan kapasitas SDM pengelola keuangan. 6. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem dan teknologi informasi dalam penatausahaan BMD; 7. Meningkatkan koordinasi dan pengawasan dengan OPD terkait dengan pengelolaan BMD; 8. Meningkatkan kapasitas SDM pengelola Barang Milik Daerah.

		Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan instensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;2. Mengoptimalkan kualitas pelayanan pemungutan pajak daerah;3. Meningkatkan validasi dan pemutakhiran data pendapatan daerah.	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pendapatan daerah;2. Meningkatkan akurasi data objek dan perkembangan situasi ekonomi masyarakat sebagai basis perhitungan potensi;3. Memperkuat rumusan penetapan target pendapatan melalui kajian ilmiah.
--	--	--	--	---

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BPKPD TAHUN 2023

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator – indikator kinerja yang ada dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2022 baik pada level tujuan, sasaran, maupun program.

Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama (IKU)
BPKPD Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Perhitungan
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan, Manajemen Aset Daerah, dan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Optimal (IKU TUJUAN)	Hasil Opini BPK terhadap LKPD	Opini BPK (WTP, WDP, Tidak Wajar, Tidak Menyatakan Pendapat)
2	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan	Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	(Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Daerah + Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Daerah) / 2

	(SAP) (IKU SASARAN)		
3	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (IKU SASARAN)	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	$\frac{\text{Realiasi PAD}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$
4	Meningkatnya Pengelolaan Organisasi Lingkup BPKPD (IKU SASARAN)	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Lingkup BPKPD	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Lingkup BPKPD Berdasarkan Hasil Penilaian Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat
5	Terwujudnya Tertib Pengelolaan Keuangan Daerah (IKU SASARAN)	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kepatuhan terhadap penyusunan anggaran daerah, pembinaan pengelolaan keuangan kabupaten, penatausahaan keuangan dan pengelolaan kas daerah, ketepatan waktu penyusunan LKPD, serta pembinaan kepada SKPD dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
6	Terwujudnya Tertib Pengelolaan Aset Daerah (IKU PROGRAM)	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Aset Daerah	Kepatuhan terhadap Pembinaan dan koordinasi kepada SKPD dalam pengusulan RKBMD; verifikasi RKBMD SKPD; pelaksanaan rekonsiliasi BMD SKPD; serta Ketepatan waktu penyusunan neraca aset.
7	Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (IKU PROGRAM)	Tingkat Pertumbuhan PAD	(Realisasi PAD Tahun 2023-Realisasi PAD Tahun 2022) : Realisasi PAD Tahun 2022 x 100%
8	Meningkatnya Kualitas Layanan Pemungutan Pajak Daerah (IKU PROGRAM)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan	Jumlah Respon Puas : Jumlah Respon x 100%
9	Meningkatnya Pengelolaan Tata Laksana Lingkup BPKPD (IKU PROGRAM)	Nilai SAKIP Lingkup BPKPD	Hasil penilaian Laporan Hasil Evaluasi (LHE) oleh Inspektorat

10	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Lingkup BPKPD (IKU PROGRAM)	Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup BPKPD	Jumlah ASN dengan deskripsi pekerjaan yang sesuai : Jumlah ASN x 100%
11	Meningkatnya Pengelolaan Data dan Informasi Lingkup BPKPD (IKU PROGRAM)	Nilai Raport SPBE/Nilai Indeks SPBE	Nilai Raport/Indeks SPBE lingkup BPKPD berdasarkan hasil penilaian Diskominfoopers
12	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Lingkup BPKPD (IKU PROGRAM)	Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup BPKPD	$\frac{\text{Tingkat Penyerapan Anggaran} + \text{Tingkat Konsistensi Penyerapan terhadap Perencanaan arus kas}}{2} \times 100\%$

C. PERJANJIAN KINERJA BPKPD TAHUN 2023

Pada tahun 20223, setelah penetapan anggaran tahun 2023, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) telah menyusun perjanjian kinerja antara Kepala BPKPD dengan Pj. Gubernur Sulawesi Barat melalui penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Penandatanganan Perjanjian Kinerja ini dilakukan dengan memperhatikan dokumen perencanaan dan kapasitas sumber daya yang dimiliki oleh BPKPD.

Indikator Kinerja Utama yang telah dirumuskan, dituangkan dan dijadikan alat ukur kinerja dalam Perjanjian Kinerja BPKPD Tahun 2023 dengan indikator dan target capaiannya secara rinci dapat dilihat dalam tabel Perjanjian Kinerja BPKPD Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja BPKPD
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan, Manajemen Aset Daerah, dan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Optimal	Hasil Opini BPK terhadap LKPD	WTP
2	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%
3	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	22%
4	Meningkatnya Pengelolaan Organisasi Lingkup BPKPD	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Lingkup BPKPD	66,86 Poin
5	Terwujudnya Tertib Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%
6	Terwujudnya Tertib Pengelolaan Aset Daerah	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Aset Daerah	100%

7	Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	Tingkat Pertumbuhan PAD	9,4%
8	Meningkatnya Kualitas Layanan Pemungutan Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan	92%
9	Meningkatnya Pengelolaan Tata Laksana Lingkup BPKPD	Nilai SAKIP Lingkup BPKPD	64,5%
10	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Lingkup BPKPD	Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup BPKPD	75%
11	Meningkatnya Pengelolaan Data dan Informasi Lingkup BPKPD	Nilai Raport SPBE/Nilai Indeks SPBE	65 Poin
12	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Lingkup BPKPD	Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup BPKPD	75 Poin

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan organisasi sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Proses tersebut dilaksanakan dengan mengukur capaian setiap indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Pengukuran kinerja atas sasaran strategis dilakukan dengan membandingkan antara rencana/target dengan realisasi setiap indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk lebih menggambarkan keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja

Skala	Kategori
91 s/d 100	Sangat Berhasil
71 s/d 90	Cukup Berhasil
55 s/d 70	Kurang Berhasil
Kurang dari 55	Tidak Berhasil

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Gambaran keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2023-2026 yang telah disusun secara paralel dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, direpresentasikan berdasarkan capaian Perjanjian Kinerja 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan, Manajemen Aset Daerah, dan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Optimal	Hasil Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	100%
2	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	22%	22,9%	104%
4	Meningkatnya Pengelolaan Organisasi Lingkup BPKPD	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Lingkup BPKPD	66,86 Poin	31,87 Poin	47,6%

5	Terwujudnya Tertib Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	100%
6	Terwujudnya Tertib Pengelolaan Aset Daerah	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Aset Daerah	100%	100%	100%
7	Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	Tingkat Pertumbuhan PAD	9,4%	0,79%	8,5%
8	Meningkatnya Kualitas Layanan Pemungutan Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan	92%	98,4%	106,9%
9	Meningkatnya Pengelolaan Tata Laksana Lingkup BPKPD	Nilai SAKIP Lingkup BPKPD	64,5 Poin	79,25 Poin	122,86%
10	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Lingkup BPKPD	Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup BPKPD	75%	100%	133,33%

11	Meningkatnya Pengelolaan Data dan Informasi Lingkup BPKPD	Nilai Raport SPBE/Nilai Indeks SPBE	65 Poin	99 Poin	152,3%
12	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Lingkup BPKPD	Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup BPKPD	75 Poin	96,15%	128,2%

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis atas capaian setiap indikator kinerja sasaran bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis, sehingga dapat digunakan untuk perbaikan perencanaan serta pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan di masa yang akan datang. Analisis terhadap capaian kinerja juga berfungsi sebagai alat ukur terhadap kesinambungan dan dukungan dari level kegiatan (Perjanjian Kinerja Eselon III) maupun sub kegiatan (Perjanjian Kinerja Eselon IV) terhadap indikator kinerja utama.

Uraian hasil analisis atas capaian setiap indikator kinerja sasaran bertujuan untuk mengetahui kemajuan dan kendala pencapaian tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, dengan mewujudkan capaian tujuan dan sasaran sebagaimana penjelasan berikut:

1. Sasaran Strategis I: **Terwujudnya Pengelolaan Keuangan, Manajemen Aset Daerah, dan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Optimal.**

Sasaran Strategis I ini diukur dengan satu (1) indikator, yaitu:

Hasil Opini BPK terhadap LKPD, dengan capaian 100% (Sangat Berhasil).

2. Sasaran Strategis II: **Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).**

Sasaran Strategis II diukur dengan satu (1) indikator yaitu: **Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)** dengan capaian **100% (Sangat Berhasil).**

3. Sasaran Strategis III: **Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah.**

Sasaran Strategis III ini diukur dengan satu (1) indikator, yaitu: **Persentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah** dengan capaian **104 % (Sangat Berhasil).**

4. Sasaran Strategis IV: **Meningkatnya Pengelolaan Organisasi Lingkup BPKPD.**

Sasaran Strategis IV diukur dengan satu (1) Indikator, yaitu:

Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Lingkup BPKPD dengan capaian 47,6% (Tidak Berhasil)

5. Sasaran Strategis V: Terwujudnya Tertib Pengelolaan Keuangan Daerah

Sasaran Strategis V diukur dengan satu (1) indikator, yaitu: **Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Daerah** dengan capaian **100% (Sangat Berhasil)**

6. Sasaran Strategis VI: Terwujudnya Tertib Pengelolaan Aset Daerah

Sasaran Strategis VI diukur dengan satu (1) indikator yaitu: **Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Aset Daerah** dengan capaian **100% (Sangat Berhasil)**

7. Sasaran Strategis VII: Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Sasaran Strategis VII diukur dengan satu (1) indikator yaitu: **Tingkat Pertumbuhan PAD** dengan capaian **8,5% (Tidak Berhasil)**

8. Sasaran Strategis VIII: Meningkatnya Kualitas Layanan Pemungutan Pajak Daerah

Sasaran Strategis VIII diukur dengan satu (1) indikator yaitu: **Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan** dengan capaian **106,9% (Sangat Berhasil)**

9. Sasaran Strategis IX: Meningkatnya Pengelolaan Tata Laksana Lingkup BPKPD

Sasaran Strategis IX diukur dengan satu indikator yaitu: **Nilai SAKIP Lingkup BPKPD** dengan capaian **122,86% (Sangat Berhasil)**

10. Sasaran Strategis X: Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Lingkup BPKPD

Sasaran Strategis X diukur dengan satu (1) indikator yaitu: **Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup BPKPD** dengan capaian **133,33% (Sangat Berhasil)**

11. Sasaran Strategis XI: Meningkatnya Pengelolaan Data dan Informasi Lingkup BPKPD.

Sasaran Strategis XI diukur dengan satu (1) indikator yaitu: **Nilai Raport SPBE/Nilai Indeks SPBE** dengan capaian **152,3% (Sangat Berhasil).**

12.Sasaran Strategis XII: **Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Lingkup BPKPD**

Sasaran Strategis XII diukur dengan satu (1) indikator yaitu: **Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup BPKPD** dengan capaian **128,2% (Sangat Berhasil).**

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Tingkat **capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tahun 2023 sebesar 100,05 (Sangat Berhasil)** yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian dari setiap sasaran strategis sebagaimana dijabarkan di bawah ini:

$$\text{Capaian SS 1} + \text{Capaian SS 2} + \text{Capaian SS 3} + \text{Capaian SS 4} + \text{Capaian SS 5} + \text{Capaian SS 6} + \text{Capaian SS 7} + \text{Capaian SS 8} + \text{Capaian SS 9} + \text{Capaian SS 10} + \text{Capaian SS 11} + \text{Capaian SS 12}$$

12

$$=(100+100+104+47,6+100+100+8,51+106,9+122,86+133,33+152,3+128,2) : 12$$

$$= 100,3 \text{ (Sangat Berhasil)}$$

Capaian indikator sasaran tersebut diukur dengan indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang telah ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan Pj Gubernur Sulawesi Barat yang ditetapkan dengan 12 sasaran strategis dan 12 indikator kinerja utama dengan uraian analisa pengukuran sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis I **Terwujudnya Pengelolaan Keuangan, Manajemen Aset Daerah, dan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Optimal.** diukur dengan indikator sebagai berikut:

Hasil Opini BPK terhadap LKPD, realisasi indikator sasarannya diukur sebagai berikut:

Jenis Opini BPK:	
- Wajar Tanpa Pengecualian	- Tidak Wajar
- Wajar Dengan Pengecualian	- Tidak Menyatakan Pendapat

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang diraih pada tahun 2023. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa indikator **Hasil Opini BPK terhadap LKPD** meraih predikat **sangat berhasil** dengan persentase capaian **100%**.

SS I yang merupakan gambaran dari Tujuan yang terdapat dalam Renstra BPKPD 2023-2026, dalam proses realisasi dan capaiannya didukung oleh **Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**.

Proses dukungan Program terhadap pencapaian Sasaran Strategis I dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Dukungan Program Terhadap Sasaran Strategis I

Sasaran Strategis I	Indikator Sasaran	Capaian	Program dan Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan, Manajemen Aset Daerah, dan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Optimal	Hasil Opini BPK terhadap LKPD	WTP	Program Pengelolaan Keuangan Daerah (Indikator: Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Daerah)	100%	100%	100% (sangat berhasil)
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (Indikator: Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Aset Daerah)	100%	100%	100% (sangat berhasil)
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (Indikator: Tingkat Pertumbuhan PAD)	9,4%	0,85%	9,1% (tidak berhasil)

2. Sasaran Strategis II Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), diukur dengan indikator Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Indikator ini diukur berdasarkan capaian indikator Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan realisasi kinerja 100 Poin dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4
Dukungan Program Terhadap Sasaran Strategis II

Sasaran Strategis II	Indikator Sasaran	Capaian	Program dan Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	Program Pengelolaan Keuangan Daerah (Indikator: Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Daerah)	100%	100%	100% (sangat berhasil)
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (Indikator: Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Aset Daerah)	100%	100%	100% (sangat berhasil)

3. Sasaran Strategis III **Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah**, diukur dengan indikator **Persentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah**. Pengukuran dilakukan oleh BPKPD Prov. Sulbar dengan realisasi kinerja 22,9% dari target 22% sehingga capaiannya adalah 104%, dengan pengukuran sebagai berikut:

- Realisasi PAD

Pendapatan Daerah

X 100%

461.625.442.352 : 2.016.073.140.760 x 100%= 22,9%

Capaian: Realisasi/Target x 100%

22,9/22x100% = 104%

Sasaran Strategis III ini merupakan Sasaran yang tertuang dalam Renstra BPKPD 2023-2026. Dalam proses realisasi dan capaian kinerjanya, SS III didukung oleh Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Dukungan Program Terhadap Sasaran Strategis III

Sasaran Strategis III	Indikator Sasaran	Capaian	Program dan Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	104%	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (Indikator: Tingkat Pertumbuhan PAD)	9,4%	0,79%	8,5%
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (Indikator: Indeks Kepuasan	92%	98,4%	106,95%

			Masyarakat terhadap Layanan)			
--	--	--	------------------------------	--	--	--

4. Sasaran Strategis IV **Meningkatnya Pengelolaan Organisasi Lingkup BPKPD**, diukur dengan indikator **Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Lingkup BPKPD**. Pengukuran dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, dengan realisasi kinerja 31,87 Poin atau dari target 66,86 Poin sehingga capaian 47,6%. SS IV merupakan Sasaran yang tertuang pada Renstra BPKPD 2023-2026 yang dalam proses realisasinya didukung oleh **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**. Proses dukungan Program tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Dukungan Program Terhadap Sasaran Strategis IV

Sasaran Strategis IV	Indikator Sasaran	Capaian	Program dan Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pengelolaan Organisasi Lingkup BPKPD	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Lingkup BPKPD	47,6%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			
			Indikator I: Nilai SAKIP Lingkup BPKPD	64,5 Poin	79,25 Poin	122,86%
			Indikator II: Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup BPKPD	75 Poin	100 Poin	133,33%

			Indikator III: Nilai Raport SPBE Lingkup BPKPD	65 Poin	99 Poin	152,3%
			Indikator IV: Tingkat Capaian Anggaran Lingkup BPKPD	75 Poin	93,67 Poin	124,89%

5. Sasaran Strategis V Terwujudnya Tertib Pengelolaan Keuangan Daerah, diukur dengan indikator Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengukuran dilakukan oleh BPKPD Prov. Sulbar dengan realisasi kinerja 100% dari target 100% (Capaian 100%). SS V merupakan gambaran dari Program Pengelolaan Keuangan Daerah yang di dalamnya terdapat enam (6) Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.7
Dukungan Kegiatan Terhadap Sasaran Strategis V

Sasaran Strategis V	Indikator Sasaran	Capaian	Kegiatan dan Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Tertib Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah (Indikator: Persentase Ketepatan Waktu Pentahapan Penyusunan APBD)	100%	40%	40%

			Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota (Indikator: Persentase Tingkat Kepatuhan terhadap Rekomendasi Hasil Evaluasi)	97%	97,1%	100%
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah (Indikator: Persentase Serapan Anggaran Belanja APBD)	93%	96,50%	103,7%
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah (Indikator: Persentase OPD yang Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	100%	100%
			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah (Indikator: Persentase	96%	95,57%	99,56%

			Realisasi Anggaran Penunjang Urusan Pengelolaan Keuangan Daerah)			
			Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Lingkup Keuangan Daerah (Indikator: Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah yang Menggunakan SIPD	80%	100%	125%

6. Sasaran Strategis VI **Terwujudnya Tertib Pengelolaan Aset Daerah** dengan indikator **Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Aset Daerah**. Pengukuran dilakukan oleh BPKPD Prov. Sulbar dengan realisasi kinerja 100% dari target 100% (Capaian 100%). SS VI merupakan gambaran dari Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan satu (1) Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.8
Dukungan Kegiatan Terhadap Sasaran Strategis VI

Sasaran Strategis VI	Indikator Sasaran	Capaian	Kegiatan dan Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Tertib Pengelolaan Aset Daerah	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Aset Daerah	100%	Pengelolaan Barang Milik Daerah	45%	46,59%	103,53%

			(Indikator: Persentase Tindaklanjut Penyelesaian Masalah BMD)			
--	--	--	---	--	--	--

7. Sasaran Strategis VII: **Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**, diukur dengan indikator sebagai berikut:

Tingkat Pertumbuhan PAD, realisasi indikator sasarannya diukur sebagai berikut:

Realisasi PAD tahun 2023 – Realisasi PAD tahun 2022

X 100%

Realisasi PAD tahun 2022

= (461.625.442.352 – 457.963.285.700)

X 100%

457.963.285.700

= 0,79%

Target indikator SS VII sebagaimana telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah **9,4%** dengan realiasi **0,79%**, persentase capaian indikator sasaran diukur dengan membandingkan antara target indikator sasaran dengan realisasi indikator sasaran, yaitu:

(Realisasi indikator sasaran : Target indikator sasaran) x 100

= (0,79 : 9,4) x 100

= 8,5%

Dalam proses pencapaiannya, SS VII merupakan gambaran dari Program Pengelolaan Pendapatan Daerah yang di dalamnya terdapat satu (1) Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.9
Dukungan Kegiatan Terhadap Sasaran Strategis VII

Sasaran Strategis VII	Indikator Sasaran	Capaian	Kegiatan dan Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	Tingkat Pertumbuhan PAD	8,5%	Pengelolaan Pendapatan Daerah (Indikator: Persentase Realisasi PAD)	100%	96,34%	96,34%

8. Sasaran Strategis VIII: **Meningkatnya Kualitas Layanan Pemungutan Pajak Daerah** diukur dengan indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan**. Realisasi indikator tersebut diukur dengan formula sebagai berikut:

Jumlah Respon Sangat Puas atau Puas

X 100%

Jumlah Respon

814 Orang : 827 Orang x 100% = 98,4%

Realisasi menunjukkan angka 98,4% dibandingkan dengan target 92%, maka capaian kinerja dari SS VIII adalah:
98,4 : 92 x 100% = **106,95%**

Dalam proses pencapaiannya, SS VIII merupakan gambaran dari Program Pengelolaan Pendapatan Daerah yang di dalamnya terdapat satu (1) Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.10
Dukungan Kegiatan Terhadap Sasaran Strategis VIII

Sasaran Strategis VIII	Indikator Sasaran	Capaian	Kegiatan dan Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Layanan Pemungutan Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan	106,95%	Pengelolaan Pendapatan Daerah (Indikator: Persentase Realisasi PAD)	100%	96,34%	96,34%

9. Sasaran Strategis IX **Meningkatnya Pengelolaan Tata Laksana Lingkup BPKPD** dengan indikator **Nilai SAKIP Lingkup BPKPD**.

Nilai SAKIP Lingkup BPKPD diukur melalui penilaian SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Prov. Sulbar yang merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Hasil reuiu dari Inspektorat menunjukkan bahwa nilai SAKIP lingkup BPKPD adalah 79,25 Poin. Jika dibandingkan dengan target kinerja yakni 64,5 Poin, maka capaian kinerja untuk SS IX ini dapat diukur dengan formulasi sebagai berikut:

(Realisasi indikator sasaran : Target Indikator Sasaran) x 100%
= 79,25 : 64,5 x 100 %
= 122,86 %

10.Sasaran Strategis X: **Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Lingkup BPKPD**, diukur dengan indikator sebagai berikut:
Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup BPKPD, diukur dengan formulasi:

Jumlah ASN dengan deskripsi pekerjaan yang sesuai
_____x100%
Jumlah total ASN BPKPD

$$= (162 : 162) \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Target indikator Sasaran Strategis X sebagaimana telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah **75%**, persentase capaian indikator sasaran diukur dengan membandingkan antara target indikator sasaran dengan realisasi indikator sasaran, yaitu:

$$(\text{Realisasi indikator sasaran} : \text{Target indikator sasaran}) \times 100\%$$

$$= (100 : 75) \times 100\%$$

$$= 133 \%$$

11. Sasaran Strategis XI **Meningkatnya Pengelolaan Data dan Informasi**

Lingkup BPKPD diukur dengan indikator sebagai berikut:

Nilai Raport SPBE/Nilai Indeks SPBE.

Berdasarkan hasil evaluasi SPBE oleh Tim Evaluator SPBE Pemprov Sulbar, BPKPD Prov. Sulbar memperoleh nilai indeks 4,54 (Memuaskan) dan menempati posisi pertama dari 42 Perangkat Daerah. Adapun dari segi poin SPBE berdasarkan penilaian, BPKPD memperoleh 99 Poin dari target 65 Poin, sehingga capaian kinerja SS XI adalah $99:65 \times 100\% = 152,3 \%$

12. Sasaran Strategis XII **Meningkatnya Pengelolaan Keuangan**

Lingkup BPKPD dengan indikator **Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup BPKPD.**

Berdasarkan data realisasi anggaran, dari total anggaran sebesar 277.828.256.552,00, BPKPD mampu merealisasi belanja sebesar 267.129.863.865,00 atau **96,15%.**

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dari Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) yang melalui proses pembahasan anggaran melalui KUPA-PPAS kemudian ditetapkan menjadi DPPA-SKPD dengan penjabaran APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023, total anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar **Rp.277.828.256.552,00** dengan realisasi sebesar **Rp 267.129.863.865** atau **96,15 %**, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.11
Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Anggaran Perubahan 2023	Realisasi	%
1	Belanja Operasi	60.577.345.925	60.284.045.502,00	99,52
2	Belanja Modal	1.420.319.820,00	1.383.699.515,00	97,42
3	Belanja Tidak Terduga	5.990.269.459,00	349.322.500,00	5,83
4	Belanja Transfer	209.840.321.348,00	205.112.796.348,00	97,75
	Total	277.828.256.552,00	267.129.863.865,00	96,15

Tabel 3.12
Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2023

No	Program	Anggaran Perubahan 2023	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	35.920.682.953	35.778.333.338	99,6
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	237.805.916.406	227.355.805.029	95,61
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	641.340.747	600.003.031	93,55
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.460.316.446	3.395.722.467	98,13
	Total	277.828.256.552,00	267.129.863.865,00	96,15

Dalam mewujudkan Sasaran Strategis yang ada dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah memanfaatkan anggaran yang tersedia yang mendukung setiap Sasaran Strategis tersebut. Gambaran mengenai hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13

Realisasi Anggaran Pada Setiap Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis BPKPD Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi Kinerja	Capaian IKU	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan, Manajemen Aset Daerah, dan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Optimal	Hasil Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	100%	1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	237.805.916.406,00	227.355.805.029,00	95,61
						2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	641.340.747,00	600.003.031,00	93,55

						3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.460.316.446,00	3.395.722.467,00	98,13
2	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Tingkat Kepatuhan terhadap SAP	100%	100%	100%	1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	237.805.916.406,00	227.355.805.029,00	95,61
						2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	641.340.747,00	600.003.031,00	93,55
3	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap	Persentase PAD Terhadap	22%	22,9%	104,09%	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.460.316.446,00	3.395.722.467,00	98,13

	Pendapatan Daerah	Total Pendapatan Daerah							
4.	Meningkatnya Pengelolaan Organisasi Lingkup BPKPD	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Lingkup BPKPD	66,86 Poin	31,87 Poin	47,66%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	35.920.682.953	35.778.333.338	99,6
5.	Terwujudnya Tertib Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	100%	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	237.805.916.406,00	227.355.805.029,00	95,61
						Kegiatan: 1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.209.710.518	1.189.082.165	98,29
						2. Pembinaan Pengelolaan	287.287.150	286.586.560	99,76

						Keuangan Daerah Kabupaten/Kota			
						3. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	800.080.425	782.691.110	97,83
						4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	764.315.088	723.088.438	94,61
						5. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	234.263.276.309	223.894.804.350	95,57
						6. Pengelolaan Data dan	481.246.916	479.552.406	99,65

						Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah			
6.	Terwujudnya Tertib Pengelolaan Aset Daerah	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Aset Daerah	100%	100%	100%	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	641.340.747,00	600.003.031,00	93,55
						Kegiatan: Pengelolaan Barang Milik Daerah	641.340.747,00	600.003.031,00	93,55
7.	Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tingkat Pertumbuhan PAD	9,4%	0,79%	8,5%	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.460.316.446,00	3.395.722.467,00	98,13
						Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.460.316.446,00	3.395.722.467,00	98,13

8.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pemungutan Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan	92%	98,4%	106,95%	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.460.316.446,00	3.395.722.467,00	98,13
						Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.460.316.446,00	3.395.722.467,00	98,13
9.	Meningkatnya Pengelolaan Tata Laksana Lingkup BPKPD	Nilai SAKIP Lingkup BPKPD	64,5 Poin	79,25 Poin	122,86%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	35.920.682.953	35.778.333.338	99,6
						Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	351.970.324	341.149.749	96,93
10.	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Aparatur	Tingkat Tata Kelola Manajemen	75%	100%	133,33%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	35.920.682.953	35.778.333.338	99,6

	Lingkup BPKPD	ASN Lingkup BKPD							
						1. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	377.689.360	368.642.422	97,6
						2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	988.761.881	975.620.075	98,67
						3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	708.784.714	702.675.880	99,14
11.	Meningkatnya Pengelolaan Data dan Informasi Lingkup BPKPD	Nilai Raport SPBE/Indeks SPBE	65 Poin	99 Poin	152,3%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	35.920.682.953	35.778.333.338	99,6

						Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	351.970.324	341.149.749	96,93
12.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Lingkup BPKPD	Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup BPKPD	75 Poin	96,15 Poin	128,2 %	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	35.920.682.953	35.778.333.338	99,6
						1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	31.052.393.740	31.006.412.065	99,85
						2. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	711.744.550	676.490.450	95
						3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	1.656.490.040	1.634.780.597	98,69

						Pemerintahan Daerah			
--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--

D. ANALISIS ATAS EFISIENSI ANGGARAN TERHADAP CAPAIAN SASARAN STRATEGIS

Berikut analisis atas efisiensi penggunaan anggaran dalam proses pencapaian setiap Sasaran Strategis tahun 2023:

Tabel 3.14
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 (4-5)
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan, Manajemen Aset Daerah, dan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Optimal	Hasil Opini BPK terhadap LKPD	100%	$(95,61+93,55+98,13) : 3 = 95,76\%$	4,23%
2	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	$(95,61+93,55) : 2 = 94,58\%$	5,42%
3	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	104,09%	98,13%	5,96%
4	Meningkatnya Pengelolaan Organisasi Lingkup BPKPD	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Lingkup BPKPD	47,66%	99,6%	-51,94%

5	Terwujudnya Tertib Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	95,61%	4,39%
6	Terwujudnya Tertib Pengelolaan Aset Daerah	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Aset Daerah	100%	93,55%	6,45%
7	Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	Tingkat Pertumbuhan PAD	8,5%	98,13%	-85,05
8	Meningkatnya Kualitas Layanan Pemungutan Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan	106,95%	98,13%	8,82%
9	Meningkatnya Pengelolaan Tata Laksana Lingkup BPKPD	Nilai SAKIP Lingkup BPKPD	122,86%	96,93%	25,93%
10	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Lingkup BPKPD	Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup BPKPD	133,33%	98,47%	34,86%
11	Meningkatnya Pengelolaan Data dan Informasi Lingkup BPKPD	Nilai Raport SPBE/Nilai Indeks SPBE	152,3%	96,93%	55,37%

12	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Lingkup BPKPD	Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup BPKPD	128,2%	97,84%	30,35%
----	--	--	--------	--------	---------------

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari keseluruhan dua belas (12) Sasaran Strategis yang menjadi tolak ukur keberhasilan BPKPD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di tahun 2023 sesuai dengan Perjanjian Kinerja, capaian dari masing-masing sasaran strategis tersebut secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Capaian Sasaran Strategis BPKPD Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan, Manajemen Aset Daerah, dan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Optimal	Hasil Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	100%
2	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	22%	22,9%	104%

4	Meningkatnya Pengelolaan Organisasi Lingkup BPKPD	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Lingkup BPKPD	66,86 Poin	31,87 Poin	47,6%
5	Terwujudnya Tertib Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	100%
6	Terwujudnya Tertib Pengelolaan Aset Daerah	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Aset Daerah	100%	100%	100%
7	Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	Tingkat Pertumbuhan PAD	9,4%	0,79%	8,5%
8	Meningkatnya Kualitas Layanan Pemungutan Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan	92%	98,4%	106,9%
9	Meningkatnya Pengelolaan Tata Laksana Lingkup BPKPD	Nilai SAKIP Lingkup BPKPD	64,5 Poin	79,25 Poin	122,86%
10	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Lingkup BPKPD	Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup BPKPD	75%	100%	133,33%

11	Meningkatnya Pengelolaan Data dan Informasi Lingkup BPKPD	Nilai Raport SPBE/Nilai Indeks SPBE	65 Poin	99 Poin	152,3%
12	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Lingkup BPKPD	Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup BPKPD	75 Poin	96,15%	128,2%

Hal ini menunjukkan bahwa capaian sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 secara umum mencapai target yang telah ditetapkan sekaligus menunjukkan adanya komitmen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran BPKPD sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran strategis tersebut di atas telah menunjukkan bahwa BPKPD berkomitmen dalam upaya mewujudkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang tertuang dalam RPD Prov. Sulbar Tahun 2023-2026. Hasil pengukuran ini juga memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang. Oleh karena itu telah dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu pembangunan di Sulawesi Barat.

Sebagai bagian penutup di LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2023 hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawsi Barat

memberikan gambaran bahwa keberhasilan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan sangat ditentukan oleh komitmen, ketertiban dan dukungan aktif segenap komponen sumber daya sebagai bagian integral dari sistem pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik daerah.

Akhirnya semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 dapat menjadi referensi yang representatif serta kredibel dalam menjelaskan kinerja BPKPD Tahun 2023 dan dapat menjadi titik balik dalam perbaikan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah di masa yang akan datang.